

Sattoko Village Ecotourism Management Assistance, Mapilli District, Polewali Mandar Regency, West Sulawesi.

Andi Arafat¹, Widyanti Utami, Andi Ridha Yayank Wijayanti
Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas

Sulawesi Barat

Email: andi.arafat@unsulbar.ac.id¹

Abstract: *The purpose of the service is in the form of ecotourism counseling and its management. As well as facilitating the formation of forest farmer groups for the Social Forestry program. The methods used are in the form of counseling, training and mentoring. The community fields and waterfall in Sattoko Village are included in a limited production forest area, this means that access to manage / utilize these objects must obtain permission from the ministry of environment and forestry. Formal institutions are needed in proposing permits for the use of Social Forestry. The institution in question is the Forest Farmer Group that does not yet exist in Sattoko Village. This activity discusses steps to legally manage the waterfall in the forest area of Sattoko village so that it can be managed into ecotourism. From this FGD it was agreed that through the facilitation of the village head in the future a Forest Farmer Group would soon be formed as an initial step in the process of proposing a Social Forestry program.*

Keywords: *Ecotourism, Limited Production Forest, Social Forestry*

Abstrak: Tujuan pengabdian berupa penyuluhan ekowisata dan pengelolaannya. Serta memfasilitasi pembentukan kelompok tani hutan untuk program Perhutanan Sosial. Adapun metode yang digunakan berupa penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Ladang masyarakat dan air terjun Desa Sattoko masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, hal ini menjadikan akses untuk mengelola/memanfaatkan objek tersebut harus mendapatkan izin dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Kelembagaan yang formal sangat diperlukan dalam pengurusan izin pemanfaatan Perhutanan Sosial. Kelembagaan yang dimaksud ialah Kelompok Tani Hutan yang belum ada di desa Sattoko. Kegiatan ini mendiskusikan tentang langkah untuk dapat secara legal mengelola air terjun yang ada di kawasan hutan desa Sattoko agar dapat dikelola menjadi ekowisata. Dari FGD ini disepakati bahwa melalui fasilitasi kepala desa kedepannya segera akan dibentuk Kelompok Tani Hutan sebagai langkah awal proses pengurusan program Perhutanan Sosial.

Kata Kunci: Ekowisata, Hutan Produksi Terbatas, Perhutanan Sosial

I. PENDAHULUAN

Ekowisata yang merupakan industri pariwisata yang sangat banyak dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri maupun mancanegara. Indonesia memiliki potensi yang cukup baik di dalam pengembangan jenis ekowisata. Daya Tarik utama dari ekowisata adalah kondisi alam sebagai operasi tur dan secara geografis yang mengarahkan wisatawan ke objek tujuan (Rijal dkk, 2020).

Sektor ekowisata dapat menjadi penghasil tambahan. Pada aspek ekologi, dapat membangun kesadaran masyarakat untuk melindungi dan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Sedangkan pada aspek sosial terjadi peningkatan kerjasama masyarakat (Hijrianti dan Mardiana, 2014). Selain itu, adanya ekowisata menciptakan alat pengelolaan lingkungan hidup bagi pemerintah daerah serta menyediakan sumber pendapatan alternatif bagi penduduk setempat sehingga menghindari pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan (Nurinsyah dkk, 2015).

Sulawesi Barat khususnya kabupaten Polewali Mandar memiliki banyak potensi destinasi wisata alam dan kergaman budaya. Desa Sattoko kecamatan Mapilli merupakan salah satu desa yang memiliki potensi wisata alam air terjun yang hanya berjarak 13 kilometer dari ibu kota kecamatan Mapilli dan lebih kurang 30 Kilometer dari ibu kota Kabupaten Polewali Mandar. Namun berdasarkan pemaparan salah satu aparat desa Sattoko, diperlukan pemahaman dan sharing pengetahuan terkait ekowisata dan manajemen pengelolannya. Hal tersebut menjadi penting untuk lahirnya pemahaman yang sesuai bagaimana potensi ekowisata alam yang dimiliki bermanfaat dan berkelanjutan bukan hanya secara ekonomi tetapi juga pada sektor sosial dan ekologi. Melihat situasi yang ada maka dibutuhkan pendampingan dalam rangka memfasilitasi terbentuknya destinasi ekowisata desa Sattoko. Sharing pengetahuan, dan dialog bersama (FGD) merupakan langkah awal yang tepat untuk ditempuh oleh pemerintah desa dan masyarakat desa Sattoko

II. METODE

Penyuluhan, Pelatihan dan Pendampingan

1. Observasi (Peninjauan Lokasi Ekowisata) Adapun data yang dikumpulkan adalah: kondisi fisik yang meliputi letak, luas, batas, vegetasi dan topografi. Serta sarana penunjang untuk mendukung

Kresna Social Science and Humanities Research

Proceedings of the National Seminar on Research and Community
Service Dissemination for Sustainable Development
<https://doi.org/10.30874/ksshr.57>

berjalannya pengembangan daya tarik wisata meliputi akses dan fasilitas.

2. Pelatihan dan sosialisasi
3. Melalui kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat akan memiliki persepsi terhadap pengelolaan ekowisata kedepannya
4. Focus Group Discussion (FGD).
5. Untuk mengakomodasikan kepentingan berbagai pihak dan menghindari timbulnya persoalan terkait rencana pembentukan ekowisata, maka perlu adanya Focus Group Discussion (FGD). FGD bertujuan menjangkau semua pendapat para pelaku ekowisata termasuk masyarakat sekitar lokasi ekowisata.

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Sebelum Pelaksanaan Kegiatan
Indikator yang digunakan meliputi kesanggupan, antusiasme dan kemampuan kelompok mitra mengikuti kegiatan yang dilakukan, tingkat kerjasama dengan pemerintah setempat dan lapisan masyarakat terkait dalam rencana pembentukan ekowisata (Wisata Air Terjun) Desa Sattoko.
2. Evaluasi Selama Kegiatan Berlangsung
Indikator yang digunakan meliputi partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap materi kegiatan, kemauan dan motivasi dalam merealisasikan rekomendasi dari hasil kegiatan.
3. Evaluasi Setelah Kegiatan Berlangsung
Indikator yang digunakan meliputi motivasi dan komitmen untuk tetap mengelola objek ekowisata yang ada secara berkelanjutan (memperhatikan kelestarian lingkungan).

III. HASIL

Observasi

Secara rinci dari hasil diskusi terarah dengan pemerintah dan masyarakat desa Sattoko, dipahami dan disepakati terdapat beberapa permasalahan, yaitu :

1. Status lokasi

Kebun dan ladang masyarakat dan air terjun Desa Sattoko masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas, hal ini menjadikan akses untuk

mengelola/memanfaatkan objek tersebut harus mendapatkan izin dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan

2. Kelembagaan

Kelembagaan yang formal sangat diperlukan (syarat) dalam pengusulan izin pemanfaatan Perhutanan Sosial. Kelembagaan yang dimaksud ialah Kelompok Tani Hutan yang belum ada di desa Sattoko.

3. Manajemen pengelolaan

Masyarakat desa Sattoko dalam pengelolaan kebun dan ladang mereka di dalam hutan masih bersifat konvensional, kecenderungannya belum memperhatikan lebih tinjauan ekologis dan konservasi demi keberlanjutan pemanfaatan, dilain sisi kejaran ekonomis juga masih hanya sebatas penjualan dalam bentuk mentah melalui pengepul yang datang membeli secara langsung. Pengelolaan izin pemanfaatan hutan membutuhkan manajemen pengelolaan berkelanjutan.

Pelatihan dan Sosialisasi

Pelatihan dan Sosialisasi dimaksudkan sebagai langkah awal terkait kejelasan informasi, tujuan dan maksud program Perhutanan Sosial. Dilain sisi juga sebagai ruang untuk masyarakat sekitar hutan Desa Sattoko dapat memperjelas berbagai hal yang terkait pemanfaatan hutan dalam kawasan hutan. Sosialisasi ini dalam bentuk dialog dan terstruktur untuk memudahkan lahirnya pemahaman bersama masyarakat desa Sattoko terkait program Perhutanan Sosial.

Focus Group Discussion (FGD)

Kegiatan FGD menjadi bagian dari kegiatan pelatihan dan sosialisasi. Kegiatan ini mendiskusikan tentang langkah untuk dapat secara legal mengelola air terjun yang ada di kawasan hutan desa Sattoko agar dapat dikelola menjadi ekowisata. Dari FGD ini disepakati bahwa melalui fasilitasi kepala desa kedepannya segera akan dibentuk Kelompok Tani Hutan sebagai langkah awal proses pengusulan program Perhutanan Sosial. Disepakati pula bahwa pihak Universitas Sulawesi Barat akan membantu dalam penyusunan berkas pengusulan sehingga diharapkan mempercepat pengurusan lahirnya izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan oleh KTH.

Kresna Social Science and Humanities Research

Proceedings of the National Seminar on Research and Community
Service Dissemination for Sustainable Development
<https://doi.org/10.30874/ksshr.57>

IV. SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang bisa ditarik dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat di Desa Sattoko, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat:

1. 794,85 ha luas wilayah Desa Sattoko merupakan wilayah yang berstatus kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan 90% masyarakat desa sangat bergantung terhadap kawasan hutan tersebut, Program Perhutanan Sosial yang memberikan izin akses kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan hasil hutan belum sepenuhnya tersosialisasi baik. Sosialisasi dan pemberian pemahaman terkait Program Perhutanan Sosial perlu untuk dilakukan.
2. Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Sattoko secepatnya harus dilakukan sebagai salah satu syarat permohonan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, sehingga ketergantungan masyarakat terhadap hutan tidak menimbulkan persoalan hukum kedepannya.
3. Universitas Sulawesi Barat memungkinkan untuk mengambil peran dalam fasilitasi pengurusan izin pemanfaatan dan pemberian bimbingan terkait pengelolaan lahan dan ekowisata berkelanjutan di Desa Sattoko.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Hijrianti, E dan Mardiana, R. 2014. *Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial dan Ekonomi Di Kampung Batusuhunan, Sukabumi*. Jurnal Sosiologi Pedesaan. Vol. 2(3). Hal. 146 -159
- Nurinsiyah, D.N., B. Gunawan., T. Husodo., & T. Uchiyama. (2015). *Ecotourism Development in Indonesia: A Case Study in Kawah Putih, West Java*. *Journal of Rural Problems*. Vo. 51(3). Hal: 197-202.
- Rijal, S., Nasri., Ardiansyah, T., Chairil, A. 2020. *Strategi dan Potensi Pengembangan Ekowisata Rumbia Kabupaten Jeneponto*. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*. Vol. 12(1). Hal: 1-13